



RENSTRA
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2017

PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021. Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Rencana Program dan kegiatan serta anggaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Dalam Rencana Strategis juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil/kinerja.

Secara filosofis dan yuridis, RENSTRA ini dibangun bertolak dari cara pandang terhadap realitas problematika kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata melalui penelaahan ruang solusi yang diamanahkan pada Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan dan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Sedangkan secara fungsional, RENSTRA ini digunakan sebagai acuan perancangan dan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata.

Kebijakan di bidang kepemudaan dalam RENSTRA diposisikan agar pemuda Indonesia mampu merespon penumbuhan aktual kepemudaan dan kemasyarakatan (bangsa), sekaligus secara proaktif mencari dan menemukan solusi demi permasalahan yang dihadapi. Hal tersebut bermakna sebagai spirit kepeloporan, kreatifitas, kepedulian, dan kesukarelaan pemuda. Oleh karenanya perlu ditingkatkan terus menerus wawasan, kapasitas dan keterampilan pemuda guna mendukung partisipasi dan pekan aktif pemuda diberbagai bidang pembangunan Nasional menuju kesejahteraan dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, serta terlaksananya pelayanan kepemudaan yang sesuai dengan karakteristik pemuda sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan.

Kebijaksanaan bidang keolahragaan dalam RENSTRA ini diposisikan pada upaya-upaya memotivasi dan memfasilitasi agar masyarakat dari berbagai lapisan lebih gemar berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup. Keberadaan dan peran olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan sektor lainnya, terutama untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, pergaulan sosial, dan kesejahteraan individu, kelompok atau masyarakat pada umumnya secara terencana dan sistematis.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpuh pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa Indonesia. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan Identitas Nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga tersusunlah Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021.

Purbalingga, 31 Januari 2017

KEPALA DINPORAPAR
KABUPATEN PURBALINGGA

DRS. IMAM HADI, M. SI.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650104198607001

DAFTAR ISI

	HALAMA N
PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
PENDAHULUAN	1
BAB I.	1
1.1 Latar Belakang Landasan	1
1.2 Hukum Maksud dan Tujuan	3
1.3	7
1.3.1 Maksud	7
1.3.2 Tujuan Sistematika	7
1.4 Penyusunan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	13
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	
2.1 OPD	14
Sumber Daya	
2.2 OPD	20
2.2.1 Data Kepegawaian PNS	20
2.2.2 Data Sarana dan Prasarana	21
2.3 Kinerja Pelayanan OPD	22
Tantangan dan Peluang Pengembangan	
2.4 Pelayanan OPD	23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	28
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	28
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	29
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	31
3.3.1 Telaahan Renstra K/L	31
3.3.2 Telaahan Renstra OPD Provinsi Telaahaan RTRW dan	31
3.4 KLHS	31
3.5 Penentuan Isu-isu	32

strategis

BAB IV	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	34
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	34
4.2	Strategi dan Kebijakan	34
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	37
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	38
BAB VII	PENUTUP	39

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA-PD)**

**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2016-2021**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat. Besarnya kompleksitas permasalahan pembangunan akibat terus bertambahnya tantangan, dinamika lingkungan internal maupun eksternal, serta adanya pergeseran standar atau ukuran-ukuran mengenai kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, menyebabkan upaya pembangunan menjadi suatu proses yang harus terus menerus dilakukan. Sejalan

dengan dinamika otonomi daerah, beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi semakin berat. Di sisi lain, daerah dihadapkan pada berbagai kendala antara lain terbatasnya ketersediaan sumberdaya pembangunan terutama sumberdaya finansial. Dengan permasalahan dan tantangan tersebut, maka penyelenggaraan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pada tahun 2015 di Kabupaten Purbalingga telah diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada), dan Bupati serta Wakil Bupati terpilih masa bakti 2016-2021 telah dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diwajibkan menyusun RPJMD sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih.

Penyusunan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 dilakukan dengan memperhatikan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025. RPJMD Tahun 2016 - 2021 merupakan penjabaran dari tahap III RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga mengacu pada Visi, Misi dan

Program prioritas Kepala Daerah yang telah dikomunikasikan secara politis dalam proses Pemilukada menjadi instrument pendekatan politik yang harus diintegrasikan dalam Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang). Pelibatan pemangku kepentingan dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan menyerap aspirasi sehingga dokumen perencanaan pembangunan tersebut semakin berbobot dan seluruh pemangku kepentingan akan mempunyai rasa memiliki. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan bawah-atas dan atas-bawah adalah bahwa Renstra disusun dengan memperhatikan masukan masyarakat, serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Renstra juga digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta akan menjadi acuan bagi masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan fakta bahwa ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau perlu adanya penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

I.2. DASAR HUKUM

- 1.** Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 2.** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3.** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4.** Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5.** Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6.** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7.** Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8.** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9.** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).

- 10.** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- 11.** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan;
- 12.** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
- 13.** Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 14.** Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- 15.** Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 16.** Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 17.** Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 18.** Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

- 19.** Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 20.** Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 21.** Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
- 22.** Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
- 23.** Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 24.** Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 25.** Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
- 26.** Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029;
- 27.** Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018.

28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga.
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
33. Perda No. 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021. (Lembaran Daerah Kab. Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8)
34. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga.

I.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 dengan maksud dan tujuannya sebagai berikut :

I.3.1. Maksud

Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021 disusun dengan maksud untuk menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih hasil pemilihan kepala daerah langsung agar menjadi panduan bagi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan

pembangunan selama kurun waktu tahun 2016 – 2021, untuk urusan wajib non pelayanan dasar dilaksanakan oleh bidang kepemudaan dan keolahragaan serta urusan pilihan pada bidang pariwisata.

I.3.2. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga tahun 2016 -2021 adalah sebagai berikut:

- a.** Mendorong terwujudnya Visi dan terlaksananya Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih periode 2016-2021.
- b.** Merumuskan gambaran umum pelayanan yang akan diselenggarakan oleh Dinporapar Kabupaten Purbalingga dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016-2021.
- c.** Mewujudkan keterkaitan antara setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih.
- d.** Meningkatkan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi antar bidang, antar program, dan antar wilayah dalam penyelenggaraan pembangunan sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumberdaya pembangunan.
- e.** Menjadi acuan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga dan pembangunan Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 2016-2021.
- f.** Menjadi pedoman dalam penyusunan Renja yang memuat strategi, arah kebijakan, program dan prakiraan maju pendanaan.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Daerah, yang meliputi :

BAB I P E N D A H U L U A N

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang mengemukakan secara ringkas: Pengertian Renstra PD; Peran PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra PD, Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja PD,

Landasan Hukum memuat : Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD; Sistematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode

sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas tantangan dan peluang utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD. Tugas, Fungsi, dan menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD(proses, prosedur, mekanisme).

Sumber daya memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

Kinerja PD memuat; tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib Layanan Dasar, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD; Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra PD, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran

kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut

BAB ini juga memuat telaah renstra kementerian/lembaga dan telaah Renstra Dinporapar terkait dengan Dinporapar Prov Jateng.

Telaah Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementrian Pariwisata serta telaah Renstra Dinporapar Kabupaten Purbalingga juga terkait dengan Renstra OPD Dinporapar prov jateng.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat; apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penentuan Isu-isu Strategis; Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari gambaran pelayanan PD, sasaran jangka menengah pada Renstra PD, dan implikasi RTRW bagi pelayanan PD, implikasi KLHS bagi pelayanan PD.

Strategi Kebijakan memuat; rumusan pernyataan strategi dan

kebijakan PD dalam lima tahun mendatang.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran ditetapkan strategi dan kebijakan guna mewujudkan tujuan dan sasaran.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB ini menjelaskan tujuan kebijakan dan sasaran Dinporapar dalam waktu lima tahun mendatang pernyataan visi dimana visi ditetapkan oleh PD. Visi pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Visi disusun mengacu pada visi RPJMD Kabupaten. Misi disusun untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.

Penetapan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD

BAB VII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB II

GAMBARAN PENLAYANAN DINPORAPAR

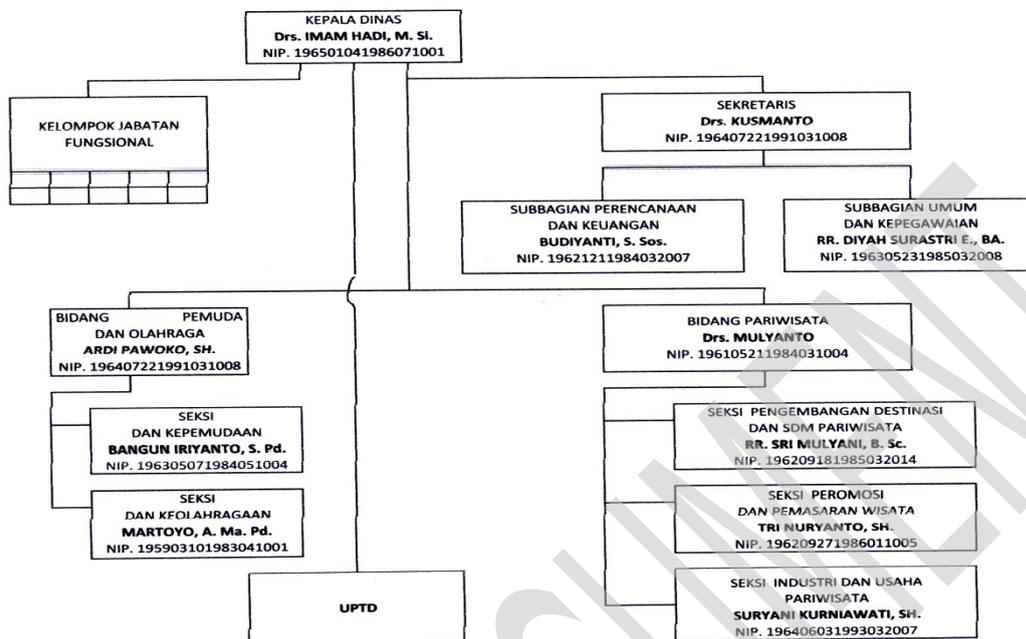
Penjabaran Perda OPD, dibentuk dari Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan Perda No.12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Purbalingga Berdasarkan peraturan tersebut Dinporapar Kabupaten Purbalingga masuk dalam dinas dengan tipe B yang melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar yaitu Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dan Urusan pilihan yaitu Bidang Pariwisata , untuk melaksanakan tugas dan fungsi ini dijabaran dalam uraian tugas dari kepala Dinas, Kepala Bidang dan Kasubag serta Kasi yang ada di Dinporapar Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

II.1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

II.1.1. Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN PURBALINGGA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN PURBALINGGA**



II.1.2. Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga

Dalam Kedudukan dan Susunan Organisasi sesuai amanat Peraturan Bupati Purbalingga No. 93 Tahun 2016 Dinbudparpora merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga serta bidang Usaha Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan susunan sebagai berikut :

Susunan Organisasi DINPORAPAR, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi;
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- a. Bidang Pemuda dan Olahraga membawahi;
 1. Seksi Kepemudaan;
 2. Seksi Keolahragaan;
- a. Bidang Pariwisata, membawahi;

1. Seksi Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
 2. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata;
 3. Seksi Industri dan Usaha Pariwisata
- a. UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Denga penjabaran tugas Kepala DINPORAPAR mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :

a. Sub Urusan Kepemudaan yaitu :

1. penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader;
2. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah.

a. Sub Urusan Keolahragaan yaitu :

1. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
3. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Provinsi;
4. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah;
5. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

a. Sub Urusan Kepramukaan yaitu pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah.

b. Sub Urusan Destinasi Pariwisata yaitu :

1. pengelolaan daya tarik wisata;
2. pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
3. pengelolaan destinasi pariwisata;
4. penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

- a.** Sub Urusan Pemasaran Pariwisata yaitu pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri tentang daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata.
- b.** Sub Urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu penyediaan prasarana (zona kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah.
- c.** Sub Urusan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud, DINPORAPAR juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut juga memiliki fungsi sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, DINPORAPAR mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang pembinaan kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan pembinaan kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
3. pelaksanaan kebijakan pembinaan kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
6. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas ini kepala dinas dibantu dalam pelaksanaannya oleh Sekretaris yang bertugas sebagai pimpinan di Sekretariat. Sekretariat ini adalah unsur pembantu Kepala Dinas dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam hal ini Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan Dinas serta pemberian dukungan administratif Bidang Perencanaan dan Keuangan,

Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINPORAPAR.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretariat DINPORAPAR mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan DINPORAPAR;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan DINPORAPAR;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan DINPORAPAR;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DINPORAPAR;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- H pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat

Tugas Kesekretariatan ini terdiri dari Subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian yang berada ditanggung jawab Sekretaris ini adalah :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbag ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan dinas.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbag ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Umum dan Kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader;
- b. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah;
- c. pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah;
- d. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi;
- e. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah;
- f. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
- g. pembinaan profesionalisme atlet dan tenaga keolahragaan;
- h. pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
- i. pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat dan aktivitas keolahragaan;
- j. fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan, pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemuda Dan Olahraga

Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga. Seksi Bidang Pemuda dan Olahraga ini terdiri dari :

1. Seksi Kepemudaan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan

terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah, pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah.

2. Seksi Keolahragaan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah, pembinaan profesionalisme atlet dan tenaga keolahragaan, pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga, pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat dan aktivitas keolahragaan, fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan, pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.

Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata adalah unsur pelaksana Pariwisata, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pariwisata mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Promosi dan Pemasaran Wisata, Industri dan Usaha Pariwisata.

Bidang Pariwisata menyelenggarakan serta melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengembangan destinasi wisata;
- b. Penyiapan sarana prasarana wisata;
- c. Pemberdayaan masyarakat wisata dan lembaga pariwisata;
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan/peningkatan kapasitas Sumber Daya Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif;
- e. Penyelenggaraan sertifikasi profesi tenaga pariwisata, pembinaan Satuan Karya (Saka) Pariwisata;
- f. Penyelenggaraan promosi dan sarana promosi wisata;

- g. Pelaksanaan analisa dan pengembangan pasar wisata;
- h. Pelayanan informasi wisata;
- i. Pengembangan Sistem Informasi Pemasaran Pariwisata;
- j. Pelaksanaan statistik pariwisata;
- k. Penyelenggaraan kerjasama pariwisata dan hubungan antar lembaga;

- l. Pendataan dan pembinaan usaha pariwisata;
- m. Rekomendasi perizinan usaha pariwisata;
- n. Penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata;
- o. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi;
- p. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tupoksi ini Bidang Pariwisata dibantu oleh seksi-seksi pada bidang ini yang terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Manusia Pariwisata.
- b. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata.
- c. Seksi Industri dan Usaha Pariwisata.

Seksi Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan destinasi wisata, penyiapan sarana prasarana wisata, pemberdayaan masyarakat wisata dan lembaga pariwisata, pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan/peningkatan kapasitas Sumber Daya Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif, penyelenggaraan sertifikasi profesi tenaga pariwisata, pembinaan Satuan Karya (Saka) Pariwisata.

Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan promosi dan sarana promosi wisata, analisa dan pengembangan pasar wisata, pelayanan informasi wisata, pengembangan Sistem Informasi Pemasaran Pariwisata, statistik pariwisata, penyelenggaraan

kerjasama pariwisata dan hubungan antar lembaga.

Seksi Industri dan Usaha Pariwisata.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendataan dan pembinaan usaha pariwisata, rekomendasi perizinan usaha pariwisata, penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata, penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi).

II.2. Sumber Daya Dinporapar

Untuk kelancaran dalam penyelenggaraan urusan yang harus diemban oleh DINPORAPAR ini didukung dengan Sumber Daya Manusia dan Prasarana serta Prasarana yang dapat didayagunakan untuk menunjang arah dan tujuan yang diamanatkan oleh Bupati Purbalingga yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.

II.2. 1. Data Kepegawaian PNS Dinparpora

Untuk memperlancar jalannya tugas dan fungsi dinas yang dijalankan Dinporapar ini didukung dengan kondisi sumber daya manusia yang ada yaitu :

II.2.1. Sumber Daya Manusia PNS berdasar Pendidikan

NO	JABATAN	JUMLAH	PENDIDIKAN						JUMLAH
			SD	SLT P	SLTA	DIPLOMA	S1	S2	
1	Kepala Dinas	1 Oran g						1	1
2	Sekretaris Dinas	1 Oran g					1		1
3	Kepala Bidang	3 Oran g					2	1	3
4	Kasubag/Kasi	9 Oran g				2	7		9
5	Staf/ Pelaksana	25 Oran g	4	2	11	3	5		25
	Jumlah	39 Oran g	4	2	11	5	15	2	39

II.2.2. Sumber Daya Manusia PNS Berdasar Gol

NO	JABATAN	JUMLAH	GOLONGAN/RUANG				JUMLAH
			I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	1 Orang				1	1
2	Sekretaris Dinas	1 Orang				1	1
3	Kepala Bidang	3 Orang				3	3
4	Kasubag/Kasi	9 Orang			9		9
5	Staf/Pelaksana	25 Orang	4	14	7		25
	Jumlah	39 Orang	4	14	16	5	39

II.2.3. Sumber Daya Manusia PNS Berdasar Jenis Kelamin

NO	JABATAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			L	P	
1	Kepala Dinas	1 Orang	1		1
2	Sekretaris Dinas	1 Orang		1	1
3	Kepala Bidang	3 Orang	3		3
4	Kasubag/Kasi	9 Orang	2	7	9
5	Staf/Pelaksana	25 Orang	16	9	25
	Jumlah	39 Orang	22	17	39

II.2. 2. Data Prasarana dan Sarana Dinparpora

Prasarana dan sarana yang digunakan untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas ini sudah cukup memadai, adapun beberapa sarana yang ada masih perlu ditingkatkan seperti sarana kantor yang sudah cukup memperhatikan dalam kondisi bangunan dan fisiknya selain itu tidak adanya lahan parkir yang memadai ketika ada undangan yang melibatkan pihak luar saat koordinasi dan saat ada kegiatan. Dalam pengembangan kedepan diharapkan adanya pembangunan gedung baru yang bisa memperlancar tugas dan fungsi dinas. Untuk sarana berupa gelanggang olahraga yang berjumlah dua gedung gelanggang yaitu GOR Mahesa Jenar dan Stadion Guntur Darayono, sementara dalam pengembangan lebih lanjut GOR Mahesa Jenar ini akan dialihfungsikan sebagai Gedung Kesenian. Dalam pengembangan Prasaranan yang dikelola di Dinporapar yaitu Kompleks Gua Lawa, Kompleks Buper Munjulluhur, MTL Jendral Soedirman, Gor Mahesa Jenar, Stadion Guntur Daryono, Pendakian Gunung Slamet serta Petilasan Ardi Lawet. Secara menyeluruh sudah cukup memadai untuk mengembangkan PAD purbalingga hanya perlu ditingkatkan secara fungsionalnya.

NO.	PRASARANA DAN SARANA	JUMLAH
1	01.01 TANAH	16
2	02.02 ALAT-ALAT BESAR	5
3	02.03 ALAT-ALAT ANGKUT	33
4	02.04 ALAT-ALAT BENGKEL	2
5	02.05 ALAT-ALAT PERTANIAN	8
6	02.06 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	285
7	02.07 ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	17
8	02.08 ALAT KEDOKTERAN	7
9	02.09 ALAT LABORATORIUM	9
10	02.10 ALAT KEAMANAN	-
11	03.11 BANGUNAN GEDUNG	35
12	03.12 BANGUNAN MONUMEN	1
13	04.13 JALAN DAN JEMBATAN	1
14	04.14 BANGUNAN AIR IRIGASI	3
15	04.15 INSTALASI	2
16	04.16 JARINGAN	2
17	05.17 BUKU DAN PERPUSTAKAAN	8
18	05.18 BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	127
19	05.19 HEWAN TERNAK SERTA TANAMAN	3

II.3. Kinerja Pelayanan Dinparpora yang Telah di Jalankan

Kinerja pelayanan ini didokumentasikan dari Lakip yang telah dijalankan oleh Dinporapar dalam kurun waktu 5 tahun yang telah dilaksanakan.

FINAL DOCUMENT

Tabel II.3. Kinerja Pelayanan Dinparpora yang Telah di Jalankan dari Tahun 2011-2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Meningkatnya peran, partisipasi dan kepeloporan pemuda dalam pembangunan			I. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda																
				Kegiatan :																
				1. Paskibraka Sekolah Menengah	95	84	90	95	95	87.6	111.4	122.3	135.4	186.3	1.0845	0.754	0.736	0.702	0.51	
				2. Pelaksanaan Lomba Peraturan Baris Berbaris/Tata Upacara Bendera	10	0	10	15	15	0	10	9.3	12.9	25.7	#### ##	0	1.075	1.163	0.584	
				3. Lomba lomba Kepemudaan	20	98	20	20	20	8.4	10	8.1	0	21.7	2.381	9.8	2.469	#### #	0.922	
				4. Tri Lomba Juang	0	25	0	25	0	24.3	0	31.7	0	0	0	#### #	0	#### #	#### #	
				II. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga																
				Kegiatan :																

				1. Pengelolaan Stadion GOR dan Stadion	72.5	81.9	85	85	85	76.8	185.5	87.2	96.7	153.8	0.944	0.442	0.975	0.879	0.553
				2. Pembinaan Cabang Olahraga yang berkembang di masyarakat	0	0	30	30	30	0	0	0	8.3	26	####	####	####	3.61	1.15
				3. Penyelenggaraan POPDA usia Dini, SD, SMP, SM	0	237.8	240	240	240	243.4	206.8	192.7	286.6	313.4	0	1.15	1.245	0.837	0.766
				4. Fasilitas Pengiriman Atlet dalam Even Kejuaraan	14	0	15	15	15	0	0	0	19.8	18.8	####	####	####	0.758	0.798
2	Meningkatnya kegiatan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat			III. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kegiatan :															
				1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	10	10	7.5	10	10	7.4	7.5	5.8	2.7	3.8	1.3514	1.333	1.293	3.704	2.632
				2. Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi	117.5	79.5	85	90	95	98.9	98	116	109.3	127.4	1.1881	0.811	0.733	0.823	0.746
				3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	74	64.5	70	75	80	75.7	82.7	221	162.9	187.4	0.9775	0.78	0.317	0.46	0.427
				4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	8.5	9.7	15	20	20	9.7	10	144.4	120.3	189.2	0.8763	0.97	0.104	0.166	0.106
3	Meningkatnya angka kunjungan			IV. Program Pengembangan Promosi Pariwisata															

	pariwisata		Kegiatan :															
			1. Promosi dan Pemasaran Pariwisata	20	9.8	20	25	25	9.8	112.7	78.4	81.9	166.3	2.0408	0.087	0.255	0.305	0.15
	Meningkatnya nilai tambah pendukung sektor pariwisata		2. Pemilihan Kakang Mbekayu	40	38	40	45	50	37.9	0	39.4	39.4	57.3	1.0554	####	1.015	1.142	0.873
			3. Pengiriman Duta Wisata	10	9.9	10	10	10	9.9	15	8.9	9.4	21	1.0101	0.66	1.124	1.064	0.476
4	Meningkatnya pembinaan obyek wisata		V. Pengembangan Destinasi Pariwisata															
			1. Oprasional Obyek Wisata	543.6	195.7	200	210	210	326.9	247.9	214.8	205.9	713.3	1.6629	0.789	0.931	1.02	0.294
	Meningkatnya promosi pariwisata		2. Promosi dan Pemasaran Pariwisata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	####	####	####	####	####
			3. Pembinaan Masyarakat Obyek wisata	10	0	15	15	15	0	0	0	0	0	####	####	####	####	####
			4. Pengiriman pessenger lomba apresiasi dan konvensi pokdarwis	9.9	0	10	15	15	0	13.3	22.3	54.6	17.7	####	0	0.448	0.275	0.847

FINAL DOCUMENT

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinporapar

Tantangan dan peluang yang berguna mempertajam dan meningkatkan pelayanan untuk mendukung capaian RPJMD, perlu mengetahui tantangan dan peluangnya bagi capaian RPJMD yang faktor eksternal ini kami juga mengacu dan merujuk dari renstra Dinporapar provinsi kementerian Pemuda dan Olahraga juga Kementerian Pariwisata yang terdiri dari :

II.4.1 Tantangan-Eksternal

tantangan pembangunan Bidang Pemuda dan Olahraga serta Bidang Pariwisata ke depan yang harus kita hadapi antara lain:

II.4.1.1. Lingkup Nasional

a. Bidang Pemuda dan Olahraga

Adapun tantangan pembangunan pemuda ke depan yang harus kita hadapi antara lain: (i) memperkuat karakter dan jati diri pemuda di era globalisasi, (ii) meningkatkan peran aktif dan daya saing pemuda untuk menghadapi peluang bonus demografi dan *ASEAN Economic Community 2015*, serta (iii) meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pembangunan olahraga merupakan salah satu pilar untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh yang dapat mendukung produktivitas sumber daya manusia. Di samping itu olahraga dapat pula membangun karakter dan jati diri bangsa melalui nilai-nilai sportivitas, disiplin, dinamis, dan etos kerja keras. Prestasi olahraga dapat mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa di mata dunia, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, dan memperkuat ketahanan nasional.

(Cuplikan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Th. 2015-2019)

b. Bidang Pariwisata

Persaingan kerja yang akan semakin ketat dan arus pekerja asing ke negara Indonesia tidak dapat terhalangi. Hal ini praktis akan memberikan tantangan bagi

peningkatan kapasitas kualitas SDM Pariwisata Indonesia untuk mampu bersaing dengan SDM pariwisata dari luar negeri.

(Cuplikan Renstra Kementerian Pariwisata Th. 2015-2019)

II.4.1.2. Lingkup Provinsi Jawa Tengah

Tantangan DINPORA di wilayah Provinsi Jawa Tengah antara lain :

1) Semakin gencarnya serbuan nilai-nilai asing melalui berbagai media.

Dengan adanya era globalisasi dimana mudah sekali pengaruh bangsa asing masuk ke Indonesia, hal tersebut membuat budaya - budaya asing masuk dengan cara yang tidak terkontrol. Pengaruh tersebut juga telah membuat pemuda - pemuda mulai meninggalkan kebudayaan mereka sendiri dan cenderung meniru budaya asing, pergaulan pun berubah dan dirasa semakin lunturnya sifat nasionalisme dan jatidiri di kalangan generasi muda. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan Bahasa Indonesia yang tidak tepat, menurunnya kegiatan yang bertemakan nasionalisme, kurang sikap menghargai budaya bangsa dan produk bangsa sendiri, serta masih seringnya tawuran dikalangan pelajar dan mahasiswa. Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Hal 47 Tahun 2013-2018.

2) Lemahnya daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif.

Lemahnya daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif disebabkan oleh beberapa hal diantaranya pemuda masih mudah dihasut dan diadu domba, pengetahuan masih terbatas, kekompakan pemuda belum solid, pemuda sering hanya berpikir kekinian tanpa memikirkan akibatnya.

Meskipun Dinpora belum bisa menampilkan data kuantitatif, dari tahun ke tahun berdasarkan informasi di media massa dan elektronik, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang di kalangan pemuda ada kecenderungan meningkat. Hal ini merupakan tantangan yang harus diatasi guna meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga.

3) Semakin ketatnya persaingan prestasi kepemudaan dan keolahragaan di Tingkat Nasional.

Provinsi Jawa Tengah masih kesulitan untuk masuk kedalam peringkat 3 (tiga) besar Nasional. Hal ini, dapat dilihat bahwa pada penyelenggaraan PON ke XVII tahun 2008 di Kalimantan Timur, Provinsi Jawa Tengah hanya mampu menduduki peringkat ke-5 dengan perolehan medali emas sebanyak 52 sedangkan

pada pelaksanaan PON ke XVIII tahun 2012 di Riau, Provinsi Jawa Tengah naik 1 peringkat di peringkat ke 4 dengan perolehan 47 emas. Meskipun sudah berada di Peringkat ke 4, Provinsi Jawa Tengah saat ini harus berhati-hati dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Riau yang terus meningkatkan prestasi keolahragaan dengan pembangunan dan pengembangan berbagai sarana prasarana olahraganya. Saat ini Provinsi Jawa Tengah juga sedang mempersiapkan untuk menjadi Tuan Rumah PON ke XX tahun 2020. Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Hal 48 Tahun 2013-2018 .

4) Rendahnya dukungan Orang Tua terhadap Profesi Atlet.

Kebanyakan orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk menekuni olahraga secara serius dan berkesinambungan dengan tujuan akan dibina menjadi seorang atlet karena khawatir hal tersebut akan mengganggu prestasi akademik di sekolah dan masa depan yang dianggap belum menjanjikan.

5) Belum terbangunnya jiwa kewirausahaan dan kemampuan pengembangan ekonomi produktif dan kreatif di kalangan pemuda secara baik.

Hal tersebut disebabkan karena tingkat keterampilan pemuda yang masih rendah sehingga masih banyak yang menganggur karena lebih berorientasi untuk mencari pekerjaan daripada menciptakan pekerjaan.

6) Kurang berperannya partisipasi lembaga atau organisasi dan pemuda secara aktif dalam pembangunan daerah.

Kurangnya kepedulian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat terlihat dari peran pemuda yang belum maksimal, orientasi pemuda lebih banyak ke urusan politik dan uang, kadang acuh terhadap permasalahan bangsa. Lemahnya peran organisasi pemuda dapat dilihat dari banyaknya organisasi pemuda dalam melaksanakan kegiatan tergantung pada bantuan dana pemerintah daerah. Kualitas kepemimpinan pemuda yang masih rendah ini dapat dilihat dari belum banyaknya pemuda menduduki jabatan puncak di lembaga pemerintah, swasta, maupun pada organisasi kemasyarakatan, serta pada organisasi politik.

II.4.1.3. Lingkup Kabupaten Purbalingga

Besarnya kompleksitas permasalahan pembangunan akibat terus bertambahnya tantangan, dinamika lingkungan internal maupun eksternal, serta adanya pergeseran standar atau ukuran-ukuran mengenai kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, menyebabkan upaya pembangunan menjadi suatu

proses yang harus terus menerus dilakukan. Sejalan dengan dinamika otonomi daerah, beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi semakin berat. Di sisi lain, daerah dihadapkan pada berbagai kendala antara lain terbatasnya ketersediaan sumberdaya pembangunan terutama sumberdaya finansial.

II.4.2. Peluang- Eksternal

II.4.2.1. Lingkup Nasional

a. Bidang Pemuda dan Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda merupakan generasi penerus sebagai penanggungjawab dan pelaku pembangunan di masa depan, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

b. Bidang Pariwisata

Pembangunan Kepariwisata mempunyai peran strategis juga dalam mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia.

II.4.2.2. Lingkup Provinsi Jawa Tengah

Tantangan DINPORA di wilayah Provinsi Jawa Tengah antara lain :

- 1) Semakin gencarnya serbuan nilai-nilai asing melalui berbagai media.
- 2) Lemahnya daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif.
- 3) Semakin ketatnya persaingan prestasi kepemudaan dan keolahragaan di Tingkat Nasional.
- 4) Rendahnya dukungan Orang Tua terhadap Profesi Atlet.
- 5) Belum terbangunnya jiwa kewirausahaan dan kemampuan pengembangan ekonomi produktif dan kreatif di kalangan pemuda secara baik.
- 6) Kurang berperannya partisipasi lembaga atau organisasi dan pemuda secara aktif dalam pembangunan daerah.

II.4.1.3. Lingkup Kabupaten Purbalingga

Sejalan dengan dinamika otonomi daerah, beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi semakin berat.

FINAL DOCUMENT

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

III. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinporapar.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan karena tujuan serta sasaran prioritas pembangunan daerah dalam suatu periode belum tentu terkait dengan seluruh urusan pemerintahan. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat. Analisis permasalahan pembangunan diseluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan guna menjamin diperolehnya identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, diluar permasalahan program pembangunan daerah.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasarkan analisis Gambaran Umum selama 5 tahun, maka Permasalahan Pembangunan di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu pendukung upaya pembangunan manusia. Salah satu tujuan dari pembangunan bidang Renstra Dinporapar Kabupaten Purbalingga Tahun

kepemudaan dan olahraga adalah memupuk dan mengembangkan semangat kepeloporan, patriotisme, nasionalisme serta mengembangkan jiwa sportifitas disamping juga dalam rangka meningkatkan kualitas jasmani generasi muda. Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga masih perlu untuk ditingkatkan. Dalam tahun 2015, fasilitasi kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebanyak 6 (enam) kegiatan, sedangkan fasilitasi kegiatan olahraga sebanyak 26 kegiatan. Adapun prestasi olahraga Kabupaten Purbalingga di tingkat regional sebanyak 6 (enam) kejuaraan dan di tingkat nasional sebanyak 1 (satu) kejuaraan.

Salah satu tantangan dalam upaya pembangunan manusia khususnya dalam pembangunan kepemudaan adalah adanya kecenderungan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba. Untuk itu perlu peningkatan sosialisasi bahaya narkoba khususnya di kalangan generasi muda.

b. Pariwisata

Salah satu aktivitas ekonomi yang dipandang memberi efek *multiplier* yang luas dan dapat menjadi *prime mover* perekonomian daerah adalah pariwisata. Berkembangnya kepariwisataan akan dapat mengungkit pertumbuhan berbagai sektor ekonomi seperti sektor perhotelan dan restoran, sektor angkutan, sektor perdagangan, sektor industri, sektor pertanian, dan sebagainya termasuk sektor-sektor informal. Besarnya potensi kepariwisataan Kabupaten Purbalingga terutama potensi alam yang tersebar di seluruh wilayah perlu untuk didayagunakan secara optimal untuk pengembangan kepariwisataan baik melalui pengembangan obyek-obyek wisata baru oleh pemerintah kabupaten maupun melalui pengembangan desa wisata.

III. 2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 adalah **“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”**.

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi nggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

III.3. Telaah Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga juga Kementerian Pariwisata dan Dinporapar Provinsi Jawa Tengah.

III.3.1. Telaah Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Telaah Kementerian Pariwisata

- **Telaah Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga**

Dalam Perpres no 22 tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas, program ini dalam rangka menciptakan atlet andalan nasional yang mampu berprestasi di tingkat Internasional. Atlet yang masuk dalam tiga kategori muda, utama dan pratama yang didalamnya memuat target prestasi sebanyak 16.000 orang atlet yang berprestasi.

- **Telaah Renstra Kementerian Pariwisata**

Seperti yang diublikasikan oleh UNWTO pada Renstra Kementerian Pariwisata yang menyebutkan bahwa *Tourism Towards 2030/Global Overview* memprediksi pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara dunia berkisar 3,3% setiap tahun pada periode 2010-2030. Pada tahun 2011-2013, jumlah wisman dunia melampaui prediksi tersebut. Tahun 2011-2013 jumlah wisman berturut-turut sebanyak 995 juta orang, 1.035 juta orang, ini dijadikan bahan rujukan renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga.

III.3.2. Telaah Renstra Dinporapar Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Renstra Dinporapar Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 merujuk pada Renstra di Dua OPD yaitu Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, serta Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Sesuai Renstra tersebut diatas telaah yang bisa diambil dalam perencanaan pengembangan kedepan yang intinya menjalankan Visi dan Misi serta Program Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013-2021 dengan mensinkronkan kebijakan yang ada di dua OPD dimaksud sehingga kegiatan dan program yang dijalankan Dinporapar juga selaras dengan kebijakan Kedua OPD tersebut guna mendukung capaian Visi dan Misi Gubernur tersebut, yaitu Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari "Mboten Korupsi Mboten Napusi".

III.4. TELAHAH RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS-KLHS

Penyusunan renstra telah berpedoman dan mendasari pada Peraturan Daerah

Purbalingga No.5 /2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Purbalingga Tahun 2011-2031, selanjutnya berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS 2016-2021) Dinporapar Kabupaten Purbalingga tidak mengampu salah satu dari 5 progam strategis yang masuk dalam dampak indikasi program RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, sehingga tidak menindaklanjuti dengan melakukan rumusan mitigasi dan rencana alternatif.

III.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan karena tujuan serta sasaran prioritas pembangunan daerah dalam suatu periode belum tentu terkait dengan seluruh urusan pemerintahan. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat. Analisis permasalahan pembangunan diseluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan guna menjamin diperolehnya identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, diluar permasalahan program pembangunan daerah.

III.5.1. Fokus Layanan Urusan Pilihan untuk Bidang Pariwisata

Sektor Pariwisata saat ini sangat penting dalam pengembangan perekonomian daerah. Sektor pariwisata dapat dijadikan sumber pendapatan daerah yang potensial. Pariwisata tumbuh dari upaya memanfaatkan potensi alam maupun dengan membuat obyek wisata buatan yang memiliki kekhasan dan keunggulan suatu daerah.

Kabupaten Purbalingga beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam bidang pariwisata. Kemajuan di sektor pariwisata antara lain dibangunnya taman wisata air Owabong dan Purbasari, taman reptil (reptile park), museum uang, dll. Pendapatan dari sektor pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar bagi APBD Kabupaten Purbalingga.

Kinerja urusan Pariwisata dapat dilihat dari beberapa indikator dibawah ini, diantaranya yaitu pada Program pengembangan destinasi pariwisata ada 4 indikator, yaitu indikator jumlah obyek wisata, jumlah wahana baru pada obyek

wisata, jumlah kelompok sadar wisata/pemandu wisata, jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata. Dan pada

program pengembangan promosi pariwisata terdapat indikator yaitu nilai tambah sector-sektor pendukung pariwisata, PDRB sektor hotel dan restoran, PDRB sektor transportasi, jumlah kunjungan wisatawan, rata-rata tingkat hunian hotel, rata-rata lama tinggal wisatawan, jumlah PAD tingkat pariwisata. Secara rinci pencapaian kinerja urusan pariwisata dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.51.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2014

No	Indikator	Satuan	Capaian			
			2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah obyek wisata unggulan	Unit	5	5	5	5
2.	Jumlah wahana baru pada obyek wisata	Unit	2	3	8	9
3.	Jumlah kelompok sadar wisata / pemandu wisata	kelompok	6	7	7	9
1.	Jumlah kunjungan wisatawan (Wisman dan Wisnus)	Orang	1.412.060	1.507.707	1.530.679	1.458.513
2.	Rata-rata tingkat hunian hotel	Persen	6,93	7,27	14,00	15,00
3.	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1	1	1,5	1,5
4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	2,035	2,069	2,086	2,698
5.	Jumlah restoran	Unit	20	20	20	20
6.	Jumlah penginapan/ hotel	Unit	10	10	10	11

Sumber Data : Dinbudparpora Kabupaten Purbalingga

BAB IV

TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 sudah tidak ada visi dan misi dan digantikan dengan Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kabupaten Purbalingga. Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 adalah **“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”**.

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang

semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga, yang akan dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga terpilih tersebut. Misi sebagai gambaran visi yang ingin dicapai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga dalam RPJMD 2016-2021, dapat dirumuskan pada misi berikut :

A. Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

Kualitas manusia dan kualitas kehidupan manusia merupakan tujuan yang sebenarnya dari upaya pembangunan. Kualitas manusia dapat diukur dari aspek-aspek yang bersifat lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Kualitas manusia yang dicita-citakan di samping diukur dari beberapa hal tersebut, juga diukur dari kepribadian/jatidiri dan kecintaan terhadap kebudayaan dan tanah air serta tertanamnya semangat nasionalisme. Sedangkan kualitas kehidupan manusia diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar serta tersedianya secara memadai berbagai prasarana dan sarana guna

terwujudnya kehidupan yang berkualitas.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-4 adalah Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan Sasaran :

- Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga. Perangkat daerah yang terkait dengan pencapaian Misi ke-4 meliputi bidang yang melaksanakan Urusan Pemuda dan Olah Raga.

B. Misi ke-5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja

Pembangunan ekonomi menduduki posisi yang sangat strategis karena keberhasilan pembangunan ekonomi akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat sebagai hasil dari pembangunan ekonomi akan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses berbagai sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan semakin meningkatkan aktifitasnya dalam bidang ekonomi.

Upaya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta meningkatkan pendapatan per kapita riil seluruh masyarakat apabila tidak terdistribusi secara merata.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 5 adalah Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat, dengan Sasaran :

- Meningkatnya daya saing pariwisata. Perangkat daerah yang terkait dengan pencapaian Misi ke-5 ditangani langsung oleh bidang Pariwisata yang secara tugas dan pokok melaksanakan Urusan

Pariwisata.

FINAL DOCUMENT

IV.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional serta sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maka Renstra disusun dengan berpedoman dan atau memperhatikan berbagai dokumen perencanaan antara lain sebagai berikut :

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
Kepemudaan dan Olahraga 1 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda	Cakupan organisasi kepemudaan yang difasilitasi	6 organisasi	9	545.654	10	545.654	11	545.654	12	545.654	13	545.654	14	545.654	
	Cakupan kegiatan kepemudaan yang difasilitasi	6 organisasi	22		20		21		22		23		24		
2 Program Pembinaan dan Masyarakatan Olahraga	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional/Provinsi	NA	10	1.343.036	10	1.343.036	100	1.343.036	105	1.343.036	110	1.343.036	115	1.343.036	
	Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional	6	10		15		20		25		30		35		

	Cakupan kelompok/organisasi	26	1		1		1		1		1		1		
--	-----------------------------	----	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan		
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021	
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
Pariwisata															
1 Program Pengembangan Destinasi Wisata	Jumlah Destinasi Wisata yang difasilitasi/dikembangkan Jumlah desa wisata yang dikembangkan	4 paket	6 4	564,000	6 4	564,000	6 4	20,564,000	6 5	20,564,000	6 5	5,564,000	6 5	564,000	
2 Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Angka kunjungan wisatawan (orang) Jumlah/event pameran pariwisata yang diikuti	1,579,000	1,850,000 3	1,470,527	2,179,000 3	1,470,527	2,529,000 3	1,470,527	2,779,000 3	1,470,527	2,890,000 3	1,470,527	2,979,000 3	1,470,527	
3 Program Peningkatan kapasitas dan kelembagaan wisata	Jumlah Pokdarwis yang dibina		19		1		1		1		1		1		

FINAL DOCUMENT

IV.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan Dinporapar merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh OPD guna mencapai tujuan pada setiap misi yang menjadi tanggung jawab Dinporapar dalam kurun waktu Renstra Tahun 2016-2021. Strategi dan arah kebijakan dijabarkan dalam RPJMD tersebut dapat dijabarkan dalam tabel sbb:

A. TABEL SASARAN BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2016 – 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Prestasi Kepemudaan dan Olah Raga	Meningkatnya Prestasi Kepemudaan dan Olah Raga	Meningkatkan Pembinaan dan Olah Raga Prestasi	Peningkatan Fasilitas serta Pengembangan Even Kepemudaan dan Kompetisi Olahraga

B. ARAH KEBIJAKAN BIDANG PARIWISATA TAHUN 2016 – 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya daya saing pariwisata	Meningkatnya daya saing pariwisata	Meningkatkan daya ungkit dan daya saing pariwisata	Peningkatan jumlah kunjungan wisata

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program pembangunan daerah dalam Renstra pada hakekatnya merupakan kumpulan program prioritas yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan daerah, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purbalingga menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, serta fungsi penunjang pemerintahan yang dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Penetapan program pembangunan disusun dan dikelompokkan berdasarkan Misi Ke – 4 dan Misi Ke-5.

Dalam mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan maka Dinporapar menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021 sebagai berikut :

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN	SKPD
				Awal	Akhir					Utama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Jumlah prestasi Olahraga Tk. regional dan Nasional	Ke-juaraan	2	12	Meningkatkan Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga Prestasi	Peningkatan Fasilitas serta Pengembangan Even Kepemudaan dan Kompetisi olahraga	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda	Kepemudaan dan Olahraga	
								Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	
2	Meningkatnya daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	Ribuan orang	1.579	2.929	Mengembangkan destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Destinasi, Promosi dan Industri Pariwisata	Program Pengembangan destinasi wisata	Pariwisata	
								Program peningkatan kapasitas dan kelembagaan wisata	Pariwisata	
								Program promosi dan pemasaran wisata	Pariwisata	

**KINERJA PROGRAM DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 s.d. 2021**

NO	PROGRAM INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET Renstra 2016-2021	TARGET RKPD						REALISASI Renstra s/d 2016	CAPAIAN Renstra s/d 2016 (%)	STATUS	OPD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	8	9=8/4*100	10	11
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda													
1	Cakupan organisasi kepemudaan yang difasilitasi	organisasi	69	9	10	11	12	13	14	9	13		DINPOR APAR
2	Cakupan kegiatan kepemudaan yang difasilitasi	kelompok/Orang	132	22	20	21	22	23	24	22	17		DINPOR APAR
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga													
3	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional/Provinsi	piagam	450	10	10	100	105	110	115	134	30		DINPOR APAR
4	Jumlah prestasi olahraga tingkat Nasional	piagam	135	10	15	20	25	30	35	24	18		DINPOR APAR
5	Cakupan kelompok/organisasi olahraga yang difasilitasi	organisasi	6	1	1	1	1	1	1	1	17		DINPOR APAR
6	Jumlah kegiatan olahraga yang difasilitasi	kegiatan	195	20	25	30	35	40	45	35	18		DINPOR APAR
Program Pengembangan Destinasi Wisata													
7	Jumlah destinasi wisata yang difasilitasi/dikembangkan	DTW	36	6	6	6	6	6	6	14	39		DINPOR APAR
8	Jumlah desa wisata yang dikembangkan	Desa	27	4	4	4	5	5	5	5	19		DINPOR

															APAR
Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata															
9	Angka kunjungan wisata (orang)	orang	15,206,000	1,850,000	2,179,000	2,529,000	2,779,000	2,890,000	2,979,000	1,689,166	11				DINPOR APAR
10	Jumlah/event pameran pariwisata yang diikuti	event	18	3	3	3	3	3	3	2	11				DINPOR APAR
Program Peningkatan kapasitas dan kelembagaan wisata															
11	Jumlah Pokdarwis yang dibina	Kelompok	24	19	1	1	1	1	1	19	79				DINPOR APAR

MATRIK RENSTRA DINPORAPAR TAHUN 2016-2021

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (DALAM RIBUAN)												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE SENTRA SKPD TAHUN (2021)	
			TAHUN-1 (2016)		TAHUN-2 (2017)		TAHUN-3 (2018)		TAHUN-4 (2019)		TAHUN-5 (2020)		Targ et %	Rp		
			targe t %	Rp	targe t %	Rp	targe t %	Rp	targe t %	Rp	targe t %	Rp				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
SASARAN																
I Meningkatkan peran,																

partisipasi dan kepeloporan pemuda dalam pembangunan														
INDIKATOR SASARAN - Jumlah pemuda dan organisasi kepemudaan berprestasi tingkat regional dan nasional														
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda				545,654,000	725,000,000		779,000,000		920,100,000		951,930,000		3,921,684,000	
• Jumlah organisasi kepemudaan yang ada di	26													

	Purbalingga													
	Cakupan organisasi • kepemudaan yang difasilitasi	6	9		10		11		12		13		14	
	Cakupan kegiatan • kepemudaan yang difasilitasi	6	22		20		21		22		23		24	
Kegiatan :														
1	Paskibrak a Sekolah Menengah													
	Tercapainya peningkatan budaya kedisiplinan dan cinta tanah air	28	20	202,795,000	22	220,000,000	18	202,000,000	26	266,000,000	22	296,600,000	109	296,600,000
2	Pelaksanaan Lomba Peraturan Baris Berbaris/ Tata Upacara Bendera													
	meningkatkan budaya kedisiplinan dan wawasan kebangsaan	25	20	34,306,000	29	50,000,000	24	60,000,000	24	72,000,000	24	86,400,000	121	86,400,000
3	Lomba lomba Pemuda Pelopor													
	Terwujudnya peningkatan Potensi Pemuda Berprestasi	22	20	59,274,000	22	65,000,000	24	78,000,000	24	93,600,000	2	11,230,000	92	11,230,000
4	Peringatan Hari Sumpah													
	Menanamkan rasa cinta tanah air dan	66	20	81,209,000	25	100,000,000	23	115,000,000	22	126,500,000	24	151,800,000	114	151,800,000

Pemuda	kebangsaan pada para Pemuda														
5	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Pembinaan karakter Generasi Muda melalui Film	Menciptakan dan menanamkan jiwa kebangsaan dan cinta tanah air pada generasi muda	20	20	142,000,000	34	240,000,000	22	264,000,000	22	290,000,000	22	319,500,000	120	319,500,000
6	Peningkatan Jiwa Kewirausahaan Pemuda	Terwujudnya rasa jiwa kewirausahaan pada generasi muda	20	20	26,070,000	38	50,000,000	24	60,000,000	24	72,000,000	24	86,400,000	130	86,400,000
SASARAN II	Meningkatnya prestasi olahraga														
INDIKATOR SASARAN															
-	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional dan nasional														
-															
Program Pembina				627,016,000		990,000,000		1,610,000,000		1,915,000,000		2,068,000,000		7,210,016,000	

an dan Pemasya rakatan Olahraga													
Jumlah prestasi • olahraga tingkat eks-Karisedan													
Jumlah prestasi • olahraga tingkat Provinsi			10		10		100		105		110		115
Jumlah prestasi • olahraga tingkat nasional	6		10		15		20		25		30		35
Jumlah kejuaraan • atau perlombaan yang diikuti :	26												
- Jumlah kejuaraan olahraga prestasi													
- Jumlah kejuaraan olahraga pendidikan													
- Jumlah kejuaraan olahraga rekreasi													

	Cakupan kelompok/org • anisasi olahraga yang difasilitasi	26	1		1		1		1		1		1	
	Jumlah kegiatan olahraga yang difasilitasi	26	20		25		30		35		40		45	
Kegiatan :														
7	Pengelolaan Stadion GOR dan Stadion Tercukupiya Operasional stadion GOR	29	20	215,334,000	46	500,000,000	24	600,000,000	25	750,000,000	21	800,000,000	137	800,000,000
8	Pembinaan Cabang Olahraga Terpilih (Unggulan) Terbinanya cabang olahraga unggulan	35	20	18,915,000	32	30,000,000	33	50,000,000	30	75,000,000	24	90,000,000	139	90,000,000
9	Penyelenggaraan POPDA Terseleksinya atlet berprestasi	26	20	297,923,000	17	250,000,000	56	700,000,000	23	800,000,000	21	850,000,000	137	850,000,000
10	Penguatan Olahraga Kemasyarakatan Terbinanya Kelompok olahraga Tradisional	20	20	42,875,000	28	60,000,000	25	75,000,000	21	80,000,000	21	85,000,000	116	85,000,000
11	Gerak Jalan 28 Km dan Lari 10 Km Terkirimnya peserta Gerak Jalan 28 Km	20	20	32,319,000	25	40,000,000	25	50,000,000	24	60,000,000	23	70,000,000	117	70,000,000

1 2	Peringatan Hari Olahraga Nasional;	Pemasyarakatan Olahraga	20	20	19,650,000	31	30,000,000	33	50,000,000	24	60,000,000	26	78,000,000	134	78,000,000
1 3	Fasilitasi kegiatan dan sarana olahraga	Teselenggarakannya kegiatan olahraga	0			#DIV/0!	80,000,000	21	85,000,000	21	90,000,000	21	95,000,000	#DIV/0!	95,000,000
		Terfasilitasinya sarana olahraga												0	0
SASARAN V II	Meningkatnya PDRB Perkapita serta terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang signifikan														
INDIKATOR SASARAN	- Pendapatan Perkapita - Laju pertumbuhan ekonomi														
Program					215,00		730,00		795,000		900,000		975,000	0	3,615,0

Promosi dan Pemasaran Pariwisata				0,000		0,000		,000		,000		,000		00,000
	Jumlah Destinasi • Wisata yang difasilitasi/dikembangkan	4 Destinasi	4		4	4		5		5		5		0
Kegiatan :													0	0
1 4	Promosi daya tarik wisata Purbalingga	31		170,000,000	47	400,000,000	20	400,000,000	20	400,000,000	20	400,000,000	107	400,000,000
1 5	Pemilihan Kakang Mbekayu Duta Wisata Purbalingga	34		20,000,000	90	90,000,000	22	100,000,000	25	125,000,000	22	135,000,000	159	135,000,000
	Terpilihnya duta wisata untuk dikirim ke Provinsi				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0
1 6	Pengiriman Duta Wisata Di Tingkat Provinsi Jawa Tengah	28		25,000,000	28	35,000,000	23	40,000,000	25	50,000,000	20	50,000,000	96	50,000,000
1 7	Familiriazation Tour (Famp	20		0	#DIV/0!	40,000,000	25	50,000,000	24	60,000,000	23	70,000,000	#DIV/0!	70,000,000

	Tour) bagi biro wisata	Purbalingga												
18	Promosi Pariwisata Melalui Media Digital(Twitter, Lomba Blog, Lomba Foto, Website)	Terpublikasikan ya daya tarik wisata Purbalingga melalui website	20	0	#DIV/0!	30,000,000	33	50,000,000	30	75,000,000	27	100,000,000	#DIV/0!	100,000,000
19	Safari Jurnalistik Wisata	Terpromosinya daya tarik wisata Purbalingga melalui para jurnalis	20	0	#DIV/0!	60,000,000	22	65,000,000	23	75,000,000	21	80,000,000	#DIV/0!	80,000,000
20	Partisipasi Jateng Fair	Terpromosinya daya tarik wisata Purbalingga lewat Jateng Fair	20	0	#DIV/0!	45,000,000	27	60,000,000	27	80,000,000	25	100,000,000	#DIV/0!	100,000,000
21	Pemberitaan Info Daya Tarik Wisata Purbalingga di Media Masa	Terpublikasikan ya info daya tarik wisata Purbalingga di Media Masa	20	0	#DIV/0!	30,000,000	20	30,000,000	23	35,000,000	23	40,000,000	#DIV/0!	40,000,000
SASARAN														

V Tidak ada III INDIKATOR SASARAN - Tidak ada														
Program Pengembang an Destinasi Wisata				540,35 7,000		675,00 0,000		810,000 ,000		1,206,0 00,000		1,447,2 00,000	0	4,678,5 57,000
• Angka kunjungan wisatawan domestik	1,700,000	1,850 ,000		2,179 ,000		2,529 ,000		2,779 ,000		2,890 ,000		2,979 ,000		0
• Angka kunjungan wisatawan mancanegara	200	250		300		350		400		450		500		0
Kegiatan :													0	0
2 2 Pengelola an Obyek- obyek Wisata	34	520,35 7,000	25	650,00 0,000	24	780,000 ,000	30	1,170,0 00,000	24	1,404,0 00,000	103	1,404,0 00,000		
2 3 Pembinaa n Saka Pariwisat a	28	20,000 ,000	25	25,000 ,000	24	30,000, 000	24	36,000, 000	24	43,200, 000	97	43,200, 000		
SASARAN V Tidak ada III INDIKATOR SASARAN - Tidak ada														

Program Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Wisata				330,000,000		440,000,000		1,010,000,000		1,200,000,000		1,347,600,000		4,327,600,000
Kegiatan :													0	0
24 Sosialisasi Penerapan serta pengawasaan Standarisasi Usaha Pariwisata	Tersosialisasi kannya TDUP	20	0	#DIV/0!	50,000,000	24	60,000,000	20	60,000,000	20	60,000,000	#DIV/0!	60,000,000	
25 Fasilitai Wisbanga	Fasilitasinya paguyuban wisbanga	20	45,000,000	20	45,000,000	240	540,000,000	24	648,000,000	24	777,600,000	308	777,600,000	
26 Pengiriman Peserta Lomba Apresiasi dan Konvensi Pariwisata	Terkirimnya peserta lomba apresiasi dan konvensi pariwisata	28	35,000,000	23	40,000,000	24	48,000,000	24	57,600,000	21	60,000,000	92	60,000,000	
27 Pembinaan Desa Wisata dan Pokdarwis	Terbinanya desa wisata dan pokdarwis	35	250,000,000	21	260,000,000	24	312,000,000	24	374,400,000	20	380,000,000	89	380,000,000	
2 Fasilitasi	Terfasilitasinya	20	0	#DIV/0!	45,000	22	50,000,	24	60,000,	23	70,000,	#DIV/0!	70,000,	

8	Paguyuban Kayulingga	a kegiatan Paguyuban Kakang Mbekayu Duta Wisata Purbalingga				0!	,000		000		000		000	0!	000
---	-------------------------	--	--	--	--	----	------	--	-----	--	-----	--	-----	----	-----

FINAL DOCUMENT

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Perangkat daerah yang terkait dengan pencapaian Misi ke-4 meliputi dinas yang melaksanakan Urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, serta Urusan Perpustakaan. Sedangkan pada Misi Ke-5 meliputi perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Tenaga kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Mikro, Penanaman Modal, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dan Urusan Transmigrasi.

Pada misi Ke-4 dan Misi Ke-5 ini peran serta Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga memiliki peran yang strategis karena menyangkut karakter generasi muda dan sekaligus mengangkat Pariwisata yang ada di Kabupaten Purbalingga agar mampu dan berdaya ungkit terhadap masyarakat Purbalingga pada khususnya.

Adapun indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tertuang dalam bentuk Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga yang ingin dicapai dalam bentuk matrik Renstra sebagaimana terlampir.

Tabel
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Renstra pada Misi 4 Pemerintah Kabupaten
Purbalingga

Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN	SKPD Utama
				Awal	Akhir					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Jumlah prestasi Olahraga Tk. regional dan Nasional	Kejuaraan	2	12	Meningkatkan Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga Prestasi	Peningkatan Fasilitas serta Pengembangan Even Kepemudaan dan Kompetisi	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda	Kepemudaan dan Olahraga	
								Program Pembinaan dan Pemasarakatan	Kepemudaan dan	

Tabel

Tujuan dan Sasaran Renstra pada Misi 5 Pemerintah Kabupaten Purbalingga :

Misi 5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja

Tujuan 1 : Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KINERJA EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN (dlm Ribuan)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	Orang	1.579	1.850	2.179	2.529	2.779	2.890	2.979

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN	SKPD Utama
				Awal	Akhir					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	Ribuan orang	1.579	2.929	Mengembangkn destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Destinasi, Promosi dan Industri Pariwisata	Program Pengembangan destinasi wisata	Pariwisata	
								Program peningkatan kapasitas dan kelembagaan wisata	Pariwisata	
								Program promosi dan pemasaran	Pariwisata	

								wisata		
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--

FINAL DOCUMENT

BAB VII

PENUTUP

Sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan, implementasi Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan Kabupaten Purbalingga pada kurun waktu 2016- 2021. Ikut nyengkuyung terwujudnya Visi pembangunan Kabupaten Purbalingga akan sangat ditentukan oleh sejauh mana efektifitas pelaksanaan Misi yang dilihat dari terwujudnya tujuan-tujuan pada setiap bidang pembangunan khususnya yang ditangani Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga. Sedangkan untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, terlebih dahulu harus dapat dicapai sasaran-sasaran pembangunan. Dalam Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 ini, sasaran-sasaran pembangunan telah dijabarkan dalam bentuk indikator-indikator kinerja yang bersifat kuantitatif sehingga dapat dilakukan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pembangunan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Untuk dapat mencapai sasaran-sasaran pembangunan sesuai indikator-indikator yang telah ditetapkan tersebut, yang lebih penting adalah sejauh mana efektivitas pelaksanaan program yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga.

Efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan bukan hanya diukur dari tingkat pencapaian *output* dibandingkan dengan *input* yang digunakan, tetapi lebih dari itu diukur juga dari sejauh mana pencapaian *outcome* dan *benefit* serta dampak dari kegiatan-kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan. Di tengah terbatasnya kemampuan keuangan daerah dan semakin meningkatnya beban dan kompleksnya kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi, maka semakin dirasakan perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sebagai sebuah perencanaan pembangunan, Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 tidak serta merta menentukan keberhasilan pembangunan Kabupaten Purbalingga pada kurun waktu lima tahun yang akan datang. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Purbalingga di samping ditentukan oleh konsistensi dalam mengimplementasikan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, juga ditentukan oleh sejauh mana semangat masyarakat dalam memasarkan wisata dan generasi muda dalam menumbuhkan karakter yang berakhlak mulia serta dukungan dari pemangku kepentingan lainnya.

Purbalingga, Januari 2017

KEPALA DINPORAPAR
KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. Imam Hadi, M. Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196108121986031014



RENSTRA
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2017

FINAL DOCUMENT